BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu faktor dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu adanya peningkatan usaha dibidang pelayanan kesehatan.

Di bidang pelayanan kesehatan, Narkotika memegang peranan penting, karena sejatinya Narkotika hanya diperuntukan sebagai pengobatan. Pada bidang pengobatan dan kesehatan, Narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, akan tetapi apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya, sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat.¹

Saat ini, perkembangan Narkotika semakin pesat dan tidak lagi untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi untuk memperoleh keuntungan secara besar dengan cara perdagangan Narkotika secara ilegal ke berbagai negara. Perkembangan Narkotika yang pesat telah membuat warga dunia resah karena akibat negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkotika bagi

¹ Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, 1st ed, UMM Press, Malang, hlm. 3.

kehidupan. Penyalahgunaan Narkotika tersebut telah menyebar keseluruhan negara termasuk Indonesia.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah menjadi semacam *Way of Life*, khususnya di kalangan artis, *Yuppies (Young Urban Professionals)*, kelas menengah ke atas dan lainnya.² Praktek penyalahgunaan Narkotika tidak hanya terjadi di perkotaan saja melainkan sudah merambah ke pedesaan dan pada semua golongan masyarakat baik kaya, miskin, tua, muda, bahkan tidak jarang terdapat aparat penegak hukum yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Sedangkan penyalah guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna Narkotika merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan juga disertai suatu sanksi pidana tertentu.³

Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum, dimana secara teoritis sifat dari hukum adalah universal, yang berarti penanganan dan perundangannya berlaku sama terhadap semua warga masyarakat.⁴ Sebagai negara hukum Indonesia memiliki produk-produk hukum yang dimaksudkan untuk mengatur segala tindakan seluruh masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana. Terkait dengan tindak pidana narkotika, Indonesia telah mempunyai produk hukum yang mengaturnya sendiri yaitu Undang-Undang

²Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Narkoba dan Peradlannya di Indonesia*, O.C Kaligis&Associates, Jakarta, hlm.249.

³Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

⁴Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengatur perbuatan yang dilarang dan di pidana beserta sanksi-sanksi dijatuhkan terhadap pengedar tindak pidana narkotika.

Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan seperti yang terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Pada kasus-kasus narkotika, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pengedar, yaitu Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkotika. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00. Sedangkan Pasal 127 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap penyalah guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Selanjutnya pada Pasal 127 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009

menyatakan, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 UU Narkotika. Ketiga pasal itu mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pengguna Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan social.

Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan penyalahguna Narkotika dapat kehilangan hak untuk rehabilitasi apabila terhadapnya didakwa sebagai pengedar tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan para pelaku kejahatan Narkotika (pengedar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan Narkotika atau penyalahguna. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.

Sebagai contoh, pada Juli 2017, Antara melaporkan seorang terpidana kasus Narkotika Sutrisno Nugroho mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait dengan sanksi pidana bagi

pelaku penyalahgunaan Narkotika. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 112, Pasal 114, serta Pasal 127 UU Narkotika, yang memuat sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Sutrisno dikenakan pasal 112 dan pasal 114 peraturan yang dikenal dengan UU Narkotika tersebut, padahal seharusnya dua pasal tersebut dikenakan kepada para pengedar. Tetapi Pasal 127 justru dihilangkan dan tidak diterapkan kepada si pemakai atau pengguna narkotika, sehingga pemohon pun kehilangan haknya untuk diberikan kesempatan rehabilitasi.⁵

Hal tersebut berbeda dengan kasus Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Plg. Pada kasus tersebut terdakwa didakwa sebagai pelaku atau pengedar Narkotika, akan tetapi Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa adalah pemakai narkotika. Kasus tersebut dengan terdakwa bernama Dedy Sanjaya dan M Kiki Prataman. Kedua terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika dan/atau dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika, dan/atau dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hal ini terdakwa terbukti menguasai dan memiliki Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebanyak 1 paket sabu dengan berat 0,73 gram. Dari penemuan barang bukti tersebut seharusnya terdakwa dijerat Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada kenyataannya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa terdakwa merupakan

⁵ Huesin Abdulsalam, "Dilema Hukuman Rehabilitasi Narkoba", (<https://tirto.id>, diakses 20 Juni 2019)

pemakai atau pecandu atau penyalahguna Narkotika sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana 2 tahun penjara.⁶

Adanya ketidakjelasan rumusan dan multitafsir terhadap Pasal 112 dan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memunculkan ketertarikan penulis untuk mengkajinya dengan melakukan penelitian dengan judul “KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN NILAI KEADILAN”

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pengedar Narkotika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Sudah memenuhi rasa keadilan ?
2. Bagaimanakah kebijakan aplikasi hukum pidana terhadap pengedar Narkotika dalam peradilan pidana di Indonesia ?
3. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang terhadap pelaku dan penyalahguna berdasarkan nilai keadilan ?

⁶ Fitri Resnawardhani, “Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” *Lentera Hukum*, Volume 6 Issues 1, 2019, hlm. 119.

3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pengedar Narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 sudah memenuhi rasa keadilan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan aplikasi hukum pidana terhadap pengedar Narkotika dalam peradilan pidana di Indonesia.
3. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pengedar Narkotika di masa datang guna memenuhi rasa keadilan.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pengedar Narkotika beserta penerapan hukumnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pembuat undang-undang maupun aparat penegak hukum terkait kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pengedar Narkotika beserta penerapan hukumnya.

4. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik

Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Sistem penegakan hukum identik dengan sistem peradilan pidana, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Pada hakikatnya identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan kewenangan menegakkan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem penegakan hukum pidana yang pada hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.⁷

b. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah obat-obatan yang dapat membahayakan jiwa dan merusak fisik orang yang mengkonsumsinya. Narkotika banyak digunakan dalam bidang kesehatan sebagai obat bius. Tetapi lain halnya dengan para pecandu, mereka menggunakan Narkotika tersebut untuk mencari kesenangan sesaat yang kemudian mengakibatkan mereka menjadi kecanduan dan sebagainya.

Narkotika sebagai masalah pada masyarakat majemuk berkait dengan kehidupan masyarakat itu sendiri jelas memerlukan keperangkatan-keperangkatan hukum bentuk Undang-Undang tertulis. Katakanlah sebagai hukum narkotika. Hukum Narkotika ini haruslah

⁷ Barda Nawawi Arief, 2006, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hal. 3.

merupakan hukum yang dapat menjangkau ke masa depan dan senantiasa mampu mengakomodir permasalahan Narkotika dari masa ke masa.

Hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan Narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dan perawatan para korbannya di Indonesia adalah hukum Narkotika Indonesia (*Indonesia Narcotical Law*). Sedangkan undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan narkotika.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri kesehatan.

Narkotika merupakan suatu bahan yang mengumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya. “*Drugs*” yang semula berarti jamu yang berasal dari bahan tetumbuhan yang dikeringkan, kemudian pengertiannya diperluas ialah obat pada umumnya yang meliputi juga obat-obat yang dibuat secara sintetis. Sekarang istilah “*Drugs*” digunakan

secara sempit lagi, khususnya diartikan sebagai bahan yang psikotropik yang digunakan di luar pengobatan.⁸

Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan Narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.

Secara subjektif individual, penyalahgunaan Narkotika oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individual/subjek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu; terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya.

Secara objektif, penyalahgunaan Narkotika merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat. Secara universal penyalahgunaan Narkotika dan zat-zat lain yang sejenisnya merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatif.

Seorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada Narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat

⁸ Soedarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 36.

dengan perbuatan-perbuatan; kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan lain dan kriminalitas.

5. Kerangka Teoritik

a. Teori Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Dimana sistem penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian dari proses atau tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

Munir Fuady menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.⁹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁹ Munif Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 39.

Sistem penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu :¹⁰

- a. Dilihat dari komponen substansi hukum (*legal substance*), merupakan sistem penegakan substansi hukum di bidang hukum pidana meliputi pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.
- b. Dilihat dari komponen struktural (*legal structure*), merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dengan kata lain merupakan sistem administrasi/penyelenggaraan dari berbagai profesi penegak hukum.
- c. Dilihat dari komponen budaya hukum (*legal culture*), sistem penegakan hukum merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum.

Tujuan penegakan hukum adalah tegaknya hukum, tercapainya kepastian hukum, dan terwujudnya keadilan. Apabila penegakan hukum buruk, maka mustahil tujuan itu tercapai. Penegakan hukum sebagai suatu proses dimulai pada saat peraturan hukum dibuat atau diciptakan oleh pembuat peraturan hukum. Lahirnya suatu peraturan hukum tidak dapat terlepas dari keinginan-keinginan pembuat peraturan. Masuknya berbagai pertimbangan dan faktor tidak mungkin meniadakan keinginan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 6.

subyektivitas pembuat peraturan hukum, apalagi jika peraturan hukum itu dibuat oleh suatu lembaga yang dikendalikan oleh satu atau sekelompok kecil orang.

Perumusan pikiran pembuat peraturan yang dituangkan dalam peraturan hukum akan ikut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kegagalan atau keberhasilan penegak hukum dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan atau ditegakkan itu dibuat. Jika pembuat peraturan hukum membuat peraturan hukum yang sulit dilaksanakan, maka artinya pembuat peraturan ikut mempengaruhi kegagalan para penegak hukum dalam menjalankan peraturan hukum tersebut.¹¹

Setelah pembuat peraturan memperoleh perhatian yang memadai, selanjutnya mengenai penegak hukumnya. Penegak hukum yang konvensional adalah, polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum. Peranan keempat lembaga tersebut dalam penegakan hukum tidak dapat dibantah lagi. Akan tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah berlebihannya penonjolan peranan keempat lembaga hukum tersebut dalam penegakan hukum. Menonjolnya peranan keempat lembaga tersebut dalam penegakan hukum harus dipahami dalam skala terbatas saja, yaitu di dalam perkara-perkara pidana, terutama yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat

b. Teori Kepastian Hukum

¹¹ Abdul Rachmat Budiono, *Manajemen Penegakan Hukum*, Jurnal Humaniora & Pendidikan. Vol 2 No. 1 Pebruari, 2010, (<http://library.unej.ac.id>, diakses 30 November 2016).

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :²

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian

hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

c. Teori Azas keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.³⁸ Menurut Fence M. Wantu, memberikan kriteria keadilan, yaitu: a. adanya equality artinya memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang sama didepan hukum. b. adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional berdasarkan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008*, hlm. 158. Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2014. Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.2

efisiensi artinya prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan. c. berdasarkan obyektif tiap perkara harus ditimbang sendiri. d. mengandung autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan rasa ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.¹³

6. Kepastian Hukum Menurut Fance M. Wantu, kepastian hukum dirumuskan sebagai berikut: a. Melakukan solusi autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat. b. Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan. c. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang dijadikan dasar dari putusan untuk memberikan kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.⁴¹ d. Mengandung equality memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak. ⁴² Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban.¹⁴

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hlm. 166-168. ³⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara...*, hlm. 291. ³⁸ Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 7. ³⁹ Lihat L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11. ¹⁵

¹⁴ ⁴⁰ Fance M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan....", hlm. 485. ⁴¹ Lihat Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 4. ⁴² Fance M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan....", hlm. 485. ¹⁶

Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan.⁴⁴ Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat, sebab berlakulah *lex dura, sed tamen scripta*, Undang-Undang adalah keras, akan tetapi memang demikian bunyinya.⁴⁵ 3. Kemanfaatan Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.⁴⁶ Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara

tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.¹⁵

¹⁵ Artinya, hakim dalam 43 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 160. 44 Ibid. 45 L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 14. 46 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar...*, hlm. 161

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁶ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pelaku dan penyalahguna narkoba.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pelaku dan penyalahguna narkoba.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-

¹⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, 1989, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm

tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut tentang kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pelaku dan penyalahguna narkotika.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum

lain yang erat kaitannya dengan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pelaku dan penyalahguna narkoba.

5. Metode Penyajian Data

Data – data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan dan telah terkumpul lalu disajikan secara kualitatif yang berupa uraian deskriptif dan disusun kedalam bentuk laporan penelitian yang berupa tesis.

6. Metode Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan dari data yang terkumpul, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, karena sebagian besar data yang terkumpul bersifat kualitatif.

e. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, , metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Teori-teori tersebut

meliputi tinjauan mengenai kebijakan hukum pidana dan tinjauan mengenai tindak pidana Narkotika di tinjau dari Hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pelaku dan penyalahguna Narkotika ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2009 dan penerapan hukum Pasal 112 dan Pasal 127 UU Nomor 39 Tahun 2009 dalam peradilan pidana di Indonesia.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak.